

PELAKSANAAN HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Utin Sri Ayu Supadmi¹, AB. Tangdililing², Mahyudin Syafei³

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak*

ABSTRAK

Perencanaan Pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peranaktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (*Bottom Up Planning*) yang secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2010, menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal ini tercermin dari prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi keinginan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan tidak sepenuhnya menjadi prioritas dan muncul di APBD, sehingga hasil musrenbang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Melalui penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang tersebut. Penjelasan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan musrenbang sudah terlaksana dengan baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu musrenbang kabupaten, prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing desa/kelurahan harus disinkronkan dengan program pembangunan SKPD yang notabene bersifat *Top-Down*. Pada tahap musrenbang SKPD ini terdapat usulan dari musrenbang kecamatan yang akhirnya tidak masuk dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sanggau, karena usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih matang, terukur dengan baik. Kurang maksimalnya musrenbang tersebut dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, dan faktor anggaran.

Kata Kunci : Implementasi, Musrenbang, Renja SKPD.

¹ Anggota DPRD Kabupaten Sanggau

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Diakhir-akhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Guna terwujudnya pembangunan daerah tersebut telah di susun rencana pembangunan tahunan daerah dengan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terpadu, serasi, selaras, dan seimbang antara pembangunan daerah serta antar kegiatan pemerintah dan bentuk partisipasi masyarakat yang menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dari atas ke bawah (*Bottom Up and Top Down Planning*). Melalui tahap-tahap penyusunan semua ditingkatkan pemerintah dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional sampai pada tingkat nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah sampai desa/kelurahan. Tahap penyusunan rencana pembangunan pada tingkat daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang secara konkrit menyusun usulan program/proyek pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Proses dan mekanisme Musrenbang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pihak yang menjalankan peran dan tanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan daerah haruslah mempunyai kemampuan adminsitratif. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah harus mampu mengemban tugas dan fungsinya. Oleh karena itu tingkat penyelenggaraan pembangunan daerah bergantung pada sejauh mana tingkat kemampuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam musrenbang.

Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2010, menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal ini tercermin dari dokumen perencanaan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 yang mana usulan kegiatan tersebut tidak di usulkan kembali meskipun belum terlaksana. Salah satunya tampak dari tidak munculnya beberapa prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaan di kecamatan, dalam arti pada Musrenbang Kecamatan terdapat prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi keinginan masyarakat, namun pada tingkat Kabupaten prioritas tersebut tidak muncul di APBD sehingga hasil musrenbang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan dokumen musrenbang tingkat Kecamatan Kapuas Tahun 2010 memuat beberapa prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat. Usulan kegiatan tersebut bukan semata-mata keinginan tetapi merupakan kebutuhan, karena sangat diperlukan oleh masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Kapuas. Dalam dokumen tersebut tercatat ada beberapa usulan seperti pemberian modal bagi masyarakat khususnya kaum perempuan, perbaikan infrastruktur jalan desa, perbaikan fasilitas kesehatan dan alat transportasi warga. Namun setelah satu tahun berjalan bahkan sampai tahun 2012 ini terdapat beberapa program seperti usulan kegiatan renovasi dermaga perahu dan rumah kumuh di sepanjang Sungai Kapuas yang sampai saat ini belum terlaksana, sementara kegiatan tersebut selalu diusulkan oleh masyarakat pada saat musrenbang desa dan kecamatan. Selain itu masih banyak lagi usulan kegiatan yang dialihkan dalam arti kata tidak sesuai dengan perencanaan pada saat musrenbang.

2. Permasalahan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : “faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan hasil Musrenbang di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau belum sesuai dengan usulan kegiatan”. Dengan sub-sub permasalahan antara lain : a) implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, b) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

B. TINJAUAN LITERATUR

Aspek penting dalam kajian kebijakan setelah perumusan kebijakan adalah implementasi kebijakan. Implementasi menurut Ali adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:104). Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sementara implementasi menurut Nugroho, (2004:158) pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975:447), menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas maka implementasi mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, walaupun ada kesalahan maka akan dapat disadari dengan cepat. Van Meter dan Van Horn (1975:471) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetisi dan ukuran staf suatu badan;

2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksanaan keputusan”.

Pendapat yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan.

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2006:95-100) mengemukakan model implementasi kebijakan yang menghadirkan bahwa implementasi kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; kondisi ekonomi sosial dan politik.

Selain model implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter, terdapat model implementasi lainnya yaitu implementasi yang dikembangkan oleh Edward III. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan efektivitas suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi; dan Struktur Birokrasi. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersediadan pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pertama, yang mempengaruhi efektivitas implementasi dari suatu kebijakan, adalah komunikasi. Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Kedua, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Ketiga, variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mekaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

Keempat, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya.

Sementara itu, keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:94) dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup: (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

G. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau, tim penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Kapuas, Perwakilan SKDP, 2 orang Anggota DPRD, 3 pejabat dan staf yang memiliki kewenangan dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Kapuas, Lurah, Kepala Desa, Anggota BPD, 5

orang Tokoh-tokoh masyarakat/pemuka masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dengan mewawancarai subyek penelitian. Dalam wawancara tersebut tidak dilakukan secara ketat dalam arti penulis memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan tanpa dibatasi; teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan menggunakan alat dokumentasi, dengan melihat dan meneliti berbagai dokumen dari kegiatan musrenbang Kecamatan Kapuas. Dokumen tersebut sebagai data pendukung penulis, untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Sesuai dengan jenis penelitian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif artinya setelah data-data terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut.

D. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Hasil Musrenbang Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Musrenbang sebagai bentuk paradigma baru dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia telah memberikan tempat bagi penghargaan terhadap hak-hak masyarakat dalam menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan yang akan diusulkan kepada pemerintah untuk dapat ditanggulangi. Dalam implementasinya, apa yang menjadi tujuan musrenbang sebagai sistem perencanaan partisipatif ternyata tidak seluruhnya memberikan dampak yang maksimal bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini salah satunya terjadi di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Kecamatan Kapuas yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Sanggau setiap tahun melaksanakan musrenbang baik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Fenomena menarik terkait dengan pelaksanaan musrenbang tersebut adalah hasil yang diperoleh kurang sejalan dengan apa yang direncanakan oleh masyarakat. Banyak permasalahan-permasalahan publik yang urgen diusulkan secara langsung oleh masyarakat ternyata kurang menjadi prioritas, sehingga hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan Kapuas, dikarenakan anggaran yang tidak memadai.

Dalam setiap tahapan musrenbang, keterwakilan masyarakat dapat dikatakan sudah cukup memadai. Pada saat musrenbangdes/kelurahan, misalnya, hadir anggota BPD sebagai wakil masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan wakil dari setiap kelompok masyarakat. Demikian juga pada saat musrenbang tingkat kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat juga hadir. Pada saat musrenbang tingkat kabupaten, hadir tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, keterwakilan dalam bentuk kehadiran saja

sebenarnya belum cukup menjamin aspirasi dari bawah tersampaikan atau menjadi bagian dari pengambilan keputusan di tahap selanjutnya.

Pemahaman warga tentang proses perencanaan pembangunan belum merata di seluruh masyarakat Kecamatan Kapuas. Sehingga kurang memahami ketika ditanya kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kesesuaian antara rencana dengan kebutuhan masyarakat. Ini ditandai dengan beberapa kegiatan prioritas yang diusulkan desa/kelurahan tidak terakomodir dalam prioritas kegiatan kecamatan, karena keterbatasan anggaran.

Perencanaan pembangunan memang pada akhirnya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu sebuah perencanaan partisipatif haruslah didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat disini adalah menyangkut kebutuhan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan masyarakat setempat lebih mengetahui dan merasakan langsung apa yang menjadi permasalahan hidup dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kapuas mengusulkan kegiatan yang kurang lebih sama, yang membedakan hanya lokasi kegiatannya saja. Adapun jenis kegiatan tersebut terdiri dari bidang ekonomi, fisik dan sosial budaya. Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh masyarakat disetiap desa/kelurahan terlihat fenomena usulan dalam Musrenbang di tingkat Kecamatan didominasi kegiatan fisik. Meskipun demikian prioritas kegiatan yang diusulkan untuk masing-masing desa/kelurahan berbeda. Lebih jauh dari keterangan dari para informan menunjukkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang merupakan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, disini terlihat bahwa masyarakat sudah mengetahui apa yang harus mereka usulkan kepada pemerintah melalui Musrenbang. Dan lebih dari itu dapat diketahui juga bahwasannya berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat lebih menitik beratkan pada hal-hal yang sifatnya urgen yaitu menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari

Ketika prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat dalam musrenbang sudah menjadi dokumen hasil musrenbang, maka masyarakat mengharapkan apa yang mereka usulkan dapat tercapai. Namun demikian sebagian masyarakat di Kecamatan Kapuas menilai bahwa pembangunan di kecamatan tersebut belumlah sejalan dengan prioritas pembangunan seperti apa yang mereka kehendaki. Sejalan dengan itu berikut penulis akan menyampikan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi terkait prioritas program pembangunan dalam musrenbang yang tidak atau belum terealisasi.

Diketahui bahwa, seluruh prioritas usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Kapuas tidak semuanya terealisasi. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa tidak seluruhnya apa yang menjadi keinginan masyarakat yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan usulan program pembangunan sesuai dengan kondisi yang mereka butuhkan dapat terealisasi melalui musrenbang. Lebih jauh dari hasil penelitian penulis terhadap program prioritas yang sudah terelisasi itu lebih banyak dikarenakan apa yang disulkan juga sudah termasuk dalam program SKPD.

Hasil analisis terhadap APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2011 menunjukkan masih rendahnya persentase aspirasi masyarakat, khususnya dari desa/kelurahan di Kecamatan Kapuas yang menjadi obyek penelitian, yang masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang didanai anggaran pemerintah daerah melalui hasil musrenbang. Diperkirakan hanya sekitar 50 sampai 75 % saja aspirasi masyarakat dari seluruh kegiatan pembangunan yang masuk dalam dokumen akhir. Salah satu usulan masyarakat desa yang diakomodir adalah peningkatan sarana jalan berupa pengerasan jalan, sementara usulan penting lainnya yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan tidak termasuk kegiatan yang dibiayai APBD.

Berangkat dari kenyataan tersebut, muncul beragam pertanyaan seperti: mengapa usulan masyarakat tidak ada dalam rencana akhir pembangunan ? Sampaikah aspirasi masyarakat ke jenjang berikutnya ? Sudah partisipatifkah proses yang dilakukan? Adakah peran aksi kolektif dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan ?. Sebagai bahan refleksi atas proses musrenbang yang sudah berjalan, cukup menarik untuk mengkaji kembali beberapa hal yang diduga berpengaruh terhadap diakomodir dan tidaknya aspirasi masyarakat.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Hasil Musrenbang Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil musrenbang di Kecamatan Kapuas Kabupaten sanggau.

Pertama, Faktor keakuratan usulan kegiatan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang kecamatan merupakan rumusan elite kelurahan dan desa, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Fenomena ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi dilapangan dimana, hanya terdapat beberapa orang perwakilan masyarakat. Sehingga pihak elit yang merumuskan daftar kegiatan prioritas. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah kelurahan masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang selanjutnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa musyawarah dilaksanakan untuk mencapai kata mufakat atau keputusan bersama. Dengan begitu tidak ada satu pihak pun yang terganjal pikirannya atau merasa tidak puas dengan keputusan yang akan diambil. Agar setiap pihak yang bersepakat merasa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak, maka dalam melaksanakan musyawarah akan lebih baik ada kriteria-kriteria sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Kondisi yang sama berlaku dalam pengambilan keputusan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan, akan lebih mudah bagi peserta musrenbang apabila sebelum mengambil keputusan membuat kesepakatan kriteria-kriteria tentang kegiatan apa yang akan dirprioritaskan. Kriteria tentang prioritas pembangunan ini juga akan bermanfaat untuk meminimalisir rasa curiga atau prasangka yang kurang baik dari para peserta musrenbang terutam perwakilan dari tiap desa/kelurahan. Sebab setiap perwakilan/delegasi tentu menginginkan usulan yang mereka bawa mesti

diprioritaskan. Rasa egoisme masing-masing pihak pasti ada sebagai manusia yang tidak sempurna. Rasa curiga, prasangka yang kurang baik serta egoisme tersebut akan dapat ditekan apabila para peserta telah bersepakat dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kesepakatan penentuan prioritas pembangunan sebagai pedoman untuk memutuskan kegiatan yang bagaimana yang mestinya para peserta diprioritaskan.

Kedua, faktor minimnya pendampingan, Kurangnya pendamping atau fasilitator desa yang mampu dan kompeten untuk melaksanakan perencanaan partisipatif menyebabkan prioritas kegiatan terkadang tidak bisa terakomodir dalam sebuah perencanaan pembangunan. Hal ini diklaim dan disebutkan sebagai salah satu sebab tidak dilakukannya proses pengumpulan data atau analisis situasi dan masalah desa secara partisipatif. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas tim pendamping atau fasilitator desa agar mereka mampu melaksanakan analisis situasi dan masalah secara partisipatif sebelum musrenbang desa dilaksanakan.

Ketiga, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, maka pemerintah harus menunjukkan transparansi dari pelaksanaan Musrenbang tersebut. Selama ini forum yang melibatkan masyarakat hanya terbatas di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, representasi masyarakat dalam forum-forum di tingkat kecamatan sangat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan terlibat aktif dalam Musrenbang yang diadakan oleh pemerintah baik di tingkat kelurahan dan kecamatan, karena sebagian besar masyarakat kecewa dengan rencana usulan program kegiatan yang diajukan tidak kunjung terealisasi. Agar masyarakat tidak kecewa dengan keikutsertaan dalam Musrenbang, maka perlu adanya transparansi terhadap pelaksanaan Musrenbang dimana usulan kegiatan yang sudah disusun mulai dari bawah akan muncul dalam mata anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sanggau. Agar tercipta transparansi dalam perencanaan pembangunan diperlukan dukungan dari DPRD agar mengawal usulan program kegiatan tersebut agar tetap muncul dalam APBD, selain itu peran *civil society* juga berperan penting dalam mengawal hasil musrenbang sesuai dengan yang diharapkan.

Keempat, faktor anggaran, jumlah dana yang dianggarkan untuk pembangunan hasil kegiatan musrenbang masih kurang mencukupi, hal ini dikarenakan banyak program yang harus dijalankan, artinya bahwa semua kegiatan yang sudah diprioritaskan tidak semuanya dapat terlaksana dalam satu tahun anggaran, karena ada yang sifatnya jangka panjang dan pendek. Minimnya anggaran mengakibatkan prioritas pembangunan yang dihasilkan dari musrenbang di Kecamatan Kapuas, harus disesuaikan dengan alokasi anggaran. Artinya bahwa selama ini perencanaan pembangunan bukan didasarkan atas penggalan aspirasi dari masyarakat, tetapi lebih pada penyesuaian alokasi anggaran. Apabila anggarannya dirasakan mencukupi, maka program dapat dilaksanakan dan sebaliknya apabila alokasi anggaran tidak mampu menampung seluruh kegiatan, maka akan dipilih mana kegiatan yang paling urgen dan mendesak untuk dilaksanakan

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a). Secara teoritis Musrenbang sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*, sudah terlaksana dengan baik, hanya saja belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu musrenbang kabupaten, prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing desa/kelurahan harus disinkronkan dengan program pembangunan SKPD yang notabene bersifat *Top-Down*. Pada tahap musrenbang SKPD ini terdapat usulan dari musrenbang kecamatan yang akhirnya tidak masuk dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sanggau, karena usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih matang, terukur dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan banyak usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Kapuas tidak sepenuhnya dapat terimplementasi sesuai perencanaan.
- b). Musrenbang di Kecamatan Kapuas belum sesuai dengan keinginan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :
 - a. Faktor keakuratan usulan kegiatan, usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat mulai dari musrenbang desa/kelurahan kurang memiliki kualitas untuk diprogramkan menjadi sebuah prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga pada tahapan yang lebih tinggi usulan tersebut tidak terakomodasi.
 - b. Faktor minimnya pendampingan, kurangnya pendamping atau fasilitator desa yang mampu dan kompeten untuk melaksanakan perencanaan partisipatif menyebabkan prioritas kegiatan terkadang tidak bisa terakomodir dalam sebuah perencanaan pembangunan.
 - c. Faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, proses tahapan pelaksanaan musrenbang tersebut terlihat lebih transparan hanya pada tahapan musrenbang desa dan kecamatan, sementara pada tahap musrenbang kabupaten masyarakat sulit mengakses sejauhmana usulan kegiatan mereka terakomodir.
 - d. Faktor anggaran, banyaknya prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan hasil dari penggalan aspirasi masyarakat, masih kurang diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga tidak semua program pembangunan dapat terealisasi.

b. Saran

1. Perlu adanya sinkronisasi antara model pembangunan yang bersifat *Bottom-Up* dan *Top Down* dalam rangka melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dari berbagai tingkatan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau selaku instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang perlu meningkatkan kinerja selaku koordinator lintas sektoral untuk mengakomodir

kegiatan-kegiatan prioritas masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang kecamatan agar dapat ditampung oleh SKPD atau sebaliknya kegiatan yang belum diakomodir oleh SKPD dapat direkomendasikan Bappeda kepada SKPD untuk diakomodir.

3. Perlu adanya peningkatan pemahaman perangkat kelurahan/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Ali, Mufizh. 2005. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta : Lembaga Penelitian FE-UI.
- Anderson. E. James. 1997. *Public Policy Making*. New York: HRW.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs
- Dunn, William. 1999. *Manajemen Analisis Kebijakan Publik, (edisi ke dua)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Gaffar, Afan. 1998. *Publik Policy: State Of The Disipline, Models and Proces*. Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Buni Aksara.
- Lasswell D. Harold dan Kaplan Abraham. 1970. *Power and Society*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Miles, Matthew B dan Huberman A, Michael,1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mazmanian, Daniel H. And Paul A. Sabatier. 1998. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Moleong, Lexi, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaya, A.R., 2005, *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Nazir. Moh, 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Putra, Fadillah. 2001. *Pradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Singarimbun, Masri 1998. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Syamsi, Ibnu, 1984. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Regional dan Nasional Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung
- Tjokoroamidjojo, Bintoro. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gungung Agung
- Todaro, Michael, P. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Van Meter dan Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. New York: Harvester-Wheatsheaf.
- Wahab, Abdul, Solihin. 1990. *Analisa Kebijaksanaan*. Jakarta: Buni Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dokumen :
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

BIODATA

Nama Lengkap : **UTIN SRI AYU SUPADMI**

Tempat/Tanggal/Lahir : Sanggau, 2 Desember 1963

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Ahmad Yani Lingkungan Kantu'
Kel. Tjg. Sekayam Kecamatan
Kapuas Kabupaten Sanggau

Hand Phone : 085245232002

Pendidikan : – SDN 9 Sanggau 1969-1975
– SMPN 1 Sanggau 1975-1979
– SMAN 2 Sanggau 1979-1982
– S1 UNTAN Pontianak 1982-1986

Pekerjaan : – Honor BKKBN Kab. Sangau 1987-1990
– Proyek SFDP Kabag Keuangan 1991-2002
– Anggota DPRD Kabupaten Sanggau 2009-2014

Organisasi : – Sekretaris KPPG Partai Golkar Kab. Sanggau 2003-2004
– Ketua PAC PPP Kec. Kapuas Kab. Sanggau 2005-2007
– Wakil Ketua Dewan Danfidz DPC PKB Kab. Sanggau 2007-2008
– Ketua DPC PPKB Kab. Sanggau 2007-2008
– Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Sanggau 2008-sekarang